

Konsep Penataan Permukiman yang Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pulau Lakkang

M. Arifin¹, H. Hermansyah², N. A. Sawar³, M. A. Fachruddin⁴, D. T. Jannah⁵, D. M. Ayu⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Article Info:

Received: 25 August 2020
Accepted: 02 February 2021
Available Online: 01 March 2021

Keywords:

Konsep Permukiman,
Pariwisata Berkelanjutan,
Berbasis Kearifan Lokal

Corresponding Author:

Mimi Arifin
Universitas Hasanuddin,
Makassar, Indonesia
Email: mimiarifin@yahoo.com

Abstract. *Lakkang Island has several tourism potentials such as natural, cultural and historical aspects where their spots merge together with the local settlement. Due to the sprawling settlement and its less development direction towards sustainability, the problems then arise. Hence, the settlement arrangements rooting for tourism are needed to control its development and to avoid the impact of losing its site-origin identity. Also, it can improve the quality of its environment and the living standards of the locals at once. The research objectives are to identify the physical and non-physical condition of Lakkang's settlements and to analyze as well as to compile a settlement arrangement concept supporting sustainable tourism based on the local wisdom. The research data were collected through observation, interview, questionnaire, literature study, and documentation. The data are then analyzed using spatial analysis methods, descriptive qualitative and quantitative. This research provides the concept of Lakkang Island tourism development by concerning towards the 4A concept (attraction, accessibility, amenities and ancillary) as well as the arrangement of settlement facilities and infrastructure to support the quality improvement and various sustainable tourism.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP
This open access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

How to cite (APA 6th Style):

Arifin, M., Hermansyah, H., Sawar, N. A., Fachruddin, M. A., Jannah, D. T., & Ayu, D. M. (2021). Konsep Penataan Permukiman yang Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pulau Lakkang. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 10(1), 65–75.

1. PENDAHULUAN

Pulau Lakkang sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Tallo merupakan daerah wisata sejarah di Kota Makassar. Dengan adanya bunker peninggalan Jepang yang terletak di dalamnya Kawasan ini telah diresmikan sebagai wisata sejarah tahun 2011. Keunikan lain Pulau Lakkang yakni sebagai satu-satunya pulau yang berada di tengah wilayah Kota Makassar. Selain sebagai wisata sejarah, Pulau Lakkang juga menjadi pusat penelitian lingkungan hutan *mangroove* yang ada di Makassar. Strategi yang harus dilakukan agar menimbulkan rasa kepemilikan penduduk setempat terhadap hutan mangrove tersebut ialah pengembangan ekowisata (M. Arifin et al., 2019).

Terdapatnya permukiman pada kawasan yang berpotensi wisata namun belum didukung oleh sarana dan prasarana menjadi salah satu poin permasalahan. Permukiman ini dihuni oleh masyarakat lokal yang telah menetap secara turun temurun sejak tahun 1940-an dan populasinya hingga kini sejumlah 977 penduduk (BPS, 2020) yang tumbuh tidak terencana. Adanya potensi wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan tingkat perekonomian penduduk, mengingat tingkat perekonomian penduduk Pulau Lakkang tergolong rendah. Untuk itu diperlukan penataan permukiman agar perkembangannya dapat terkontrol, sekaligus untuk mendukung potensi pariwisata yang ada. Pengembangan permukiman sebagai tujuan wisata juga dapat mengurangi permukiman kumuh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmadaniyati et al., 2017). Selain potensi pariwisata, Pulau Lakkang juga masih memiliki karakteristik pedesaan di tengah kota. Hal ini ditandai dengan banyaknya penduduk yang beprofesi sebagai petani dan petani tambak, serta wilayah yang dikelilingi dengan lahan pertanian dan pertambakan. Tanpa perhatian khusus dalam perkembangannya, wilayah dengan karakter pedesaan akan semakin menerima implikasi problematika kota yang kompleks dan semakin pudar potensi

asalnya (Widodo & Lupyanto, 2011). Oleh sebab itu, karakteristik khas dan segala potensi yang dimiliki Pulau Lakkang membutuhkan penataan pengendalian dan arahan perencanaan kawasan permukiman yang terpadu dengan fungsi kawasan wisata sejarah dan alam serta kawasan lindung agar perkembangan wilayahnya dapat menjadi terkendali dan tidak menimbulkan implikasi problematika perkotaan, kesenjangan wilayah serta tidak memudahkan potensi yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, suatu obyek wisata atau *destination* harus meliputi potensi dasar yang baik agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya (Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009). Dalam pengembangan pariwisata, terdapat 4 (empat) komponen daya tarik wisata yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction, accessibility, amenity* dan *ancillary* (Cooper et al., 1993).

Selain keempat komponen tersebut, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal juga diperlukan dengan memanfaatkan budaya, karakteristik serta memberdayakan masyarakat setempat, sehingga menjadi keunikan atau identitas khas yang dapat menjadi daya tarik wisata dan juga dapat memberi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pariwisata tersebut. Pada desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi contohnya, kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakatnya layak dijadikan suguhan wisata belajar tentang budaya dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal (Sufia et al., 2016). Adapun secara konseptual, ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Satria, 2009).

Adapun tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik permukiman Pulau Lakkang dan mengkaji konsep penataan permukiman terpadu yang mendukung pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal Pulau Lakkang.

2. DATA DAN METODE

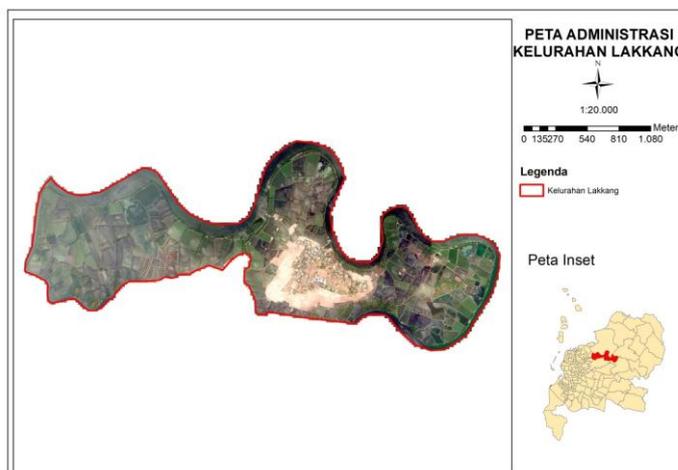
2.1. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain *literature review*, observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data yang dikumpulkan antara lain data kondisi fisik yakni prasarana dan sarana permukiman serta wisata di Pulau Lakkang. Sedangkan untuk kondisi non fisik, mencakup data sosial ekonomi dan sosial budaya antara lain jenis kelembagaan yang mendukung kegiatan wisata dan potensi ragam jenis keunikan obyek wisata sesuai potensi segi SDA dan SDM kawasan dan kemungkinan pengembangannya.

2.2. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian meliputi analisis spasial, analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta analisis konsep penataan permukiman yang mendukung pariwisata. Analisis spasial digunakan untuk pemetaan kondisi permukiman dan penggunaan lahan sebagai dasar untuk melakukan analisis selanjutnya. Analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif terhadap analisis kondisi fisik dan non fisik & analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan wisata. Adapun analisis konsep penataan permukiman berbasis wisata digunakan untuk menentukan konsep penataan permukiman pariwisata berbasis kearifan lokal.

Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Lakkang (Analisis, 2020)



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian sebelumnya oleh (Manteiro, 2016), strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal mengacu pada potensi fisik dan non-fisik wilayah yang akan dikembangkan, berkaitan dengan kekhasan masing-masing wilayah dalam menjual potensinya untuk dijadikan modal dasar sebagai desa wisata. Prinsip tersebut yang digunakan dalam penelitian ini, dengan meninjau potensi serta permasalahan fisik dan non-fisik Pulau Lakkang untuk menjadi acuan guna menghasilkan konsep penataan permukiman yang mendukung pariwisata berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman, kondisi fisik permukiman ditinjau dari beberapa aspek antara lain aksesibilitas, drainase, air bersih, air limbah, persampahan dan sarana (Standar Nasional Indonesia, 2004). Adapun kondisi non fisik dinilai dari aspek sosial ekonomi.

Kondisi Fisik Permukiman

Terbentuknya sebuah permukiman dan aktivitas yang terjadi di dalamnya akan berpengaruh terhadap bentuk fisik yang dapat diamati (Anisa et al., 2018). Kondisi fisik permukiman yang diidentifikasi pada Pulau Lakkang dalam penelitian ini, yakni antara lain jaringan infrastruktur berupa aksesibilitas, drainase, air bersih, pengelolaan air limbah, sampah, serta jaringan listrik dan telekomunikasi juga sarana permukiman antara lain sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, peribadatan, ruang terbuka hijau, serta sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Dari segi aksesibilitas, Pulau Lakkang hanya mampu dicapai dengan menggunakan transportasi air seperti perahu, sehingga dermaga berperan menjadi titik pertumbuhan dan penghubung antar Pulau Lakkang dengan daerah lainnya. Salah satu dermaga yang digunakan menuju Pulau Lakkang adalah dermaga Kera-Kera. Dermaga ini terletak pada kawasan Universitas Hasanuddin. Waktu yang ditempuh dari Dermaga Kera-Kera menuju Pulau Lakkang ialah sekitar 20 menit. Selain Dermaga Kera-Kera terdapat pula dermaga Tol yang terletak di bawah Tol Kota Makassar dan waktu yang ditempuh selama kurang lebih 10 menit. Aksesibilitas Pulau Lakkang; Jaringan jalan Pulau Lakkang dapat dikategorikan jalan lingkungan. Jaringan jalan lingkungan merupakan jaringan jalan utama di Pulau Lakkang. Jaringan jalan ini menghubungkan fungsi permukiman dengan sarana dan menghubungkan antara RW 1 dan RW 2. Adapun lebar jaringan jalan di Pulau Lakkang yakni 3 meter hingga 4 meter. Terdapat pula jaringan jalan setapak dengan ukuran lebar yang lebih kecil yakni 1 meter. Struktur jalan di daerah pasang surut berupa sebagian beton dan sebagian bertanah lunak, sedangkan jaringan jalan di darat menggunakan konstruksi paving blok. Pola jaringan jalan umumnya tidak teratur mengikuti perkembangan bangunan.

Gambar 1. Aksesibilitas Pulau Lakkang (Analisis, 2020)



Drainase di Pulau Lakkang tidak melayani keseluruhan permukiman. Adapun jenis drainase di Pulau Lakkang merupakan drainase terbuka dan drainase tertutup. Untuk drainase tertutup hanya terletak pada beberapa ruas jalan di RW 1. Jaringan drainase di Pulau Lakkang tidak memiliki konektivitas yang baik, hal ini ditunjukkan dengan kondisi jaringan drainase yang terputus-putus sehingga jaringan drainase memiliki aliran yang tidak terpadu.

Gambar 2. Jaringan Drainase Pulau Lakkang (Analisis, 2020)



Air bersih di Pulau Lakkang bersumber dari sumur bor dan pamsimas. Sumur bor yang ada di Pulau Lakkang kemudian disambungkan pada rumah warga melalui pipa dan penggunaannya dikontrol melalui alat ukur yang menjadi patokan biaya yang dikeluarkan oleh warga (Gambar 3). Namun kualitas air bersih yang ada masih kurang baik dikarenakan memiliki rasa asin.

Gambar 3. Jaringan Sumber Air Bersih (Analisis, 2020)



Pengelolaan limbah di wilayah Kelurahan Lakkang sudah dilayani dengan adanya bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebanyak 4 bangunan IPAL. Keempat IPAL tersebut melayani permukiman di Pulau Lakkang. Namun, masih terdapat hunian penduduk dimana pengelolaan limbahnya langsung ke sungai.

Gambar 4. IPAL Komunal Pulau Lakkang (Analisis, 2020)



Pengelolaan sampah di Pulau Lakkang dilakukan dengan dua cara yakni dengan membakar pada halaman rumah atau diangkut untuk kemudian dibawa ke lokasi pembuangan sampah. Sampah yang diangkut dibawa ke tempat pembuangan. Tempat pembuangan terletak pada sisi utara pulau. Lokasi pembuangan tidak terdapat pengolahan. Terdapat pula fasilitas Bank Sampah di Pulau Lakkang. Bank Sampah ini direncanakan sebagai wadah bagi warga untuk memilah sampah dan membuat kerajinan tangan dari barang bekas.

Gambar 5. Prasarana Persampahan (Analisis, 2020)



Jaringan listrik di Pulau Lakkang bersumber dari PLN. Kebutuhan listrik tersebut di layani melalui gardu induk yang terdapat di RW 1. Tiang listrik berada di beberapa bahu jalan, dan bahkan ada yang berada dalam halaman rumah warga.

Jaringan telekomunikasi di Pulau Lakkang tersedia dengan adanya BTS (*Base Transciever Station*) yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dan memiliki bentuk fisik sebuah tower atau menara yang dilengkapi dengan antena sebagai *transceiver*. Untuk kebutuhan telekomunikasi, masyarakat Kelurahan Lakkang ditunjang dengan adanya dua menara telekomunikasi.

Dari segi ketersediaan sarana, sarana pendidikan yang terdapat di Pulau Lakkang hanya sampai pada jenjang sekolah menengah pertama, yakni tersedia antara lain SD Negeri Lakkang dan SMP Negeri 44 Satap Makassar. Dimana kedua sekolah ini berada pada satu lokasi yang sama. Oleh karena sarana untuk jenjang sekolah menengah atas tidak tersedia mengharuskan warga yang akan melanjutkan pendidikan ke pusat Kota Makassar.

Adapun sarana pemerintahan yang ada berupa Kantor Lurah Pulau Lakkang. Untuk sarana kesehatan yang terdapat di Pulau Lakkang berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terletak di RW 1 dan melayani penduduk Pulau Lakkang. Sarana peribadatan di Pulau Lakkang yakni dua masjid yang terletak ada RW 1 dan RW 2. Kondisi masjid dalam keadaan layak dalam melayani warga Pulau Lakkang. Sarana ruang terbuka hijau yang tersedia di Pulau Lakkang berupa Kuburan Islam, Hutan Bambu dan Lapangan. Sarana-sarana tersebut terletak di tengah-tengah Pulau Lakkang.

Sarana ekonomi difasilitasi oleh beberapa toko atau warung yang didirikan di halaman rumah warga. Toko atau warung yang tersedia menyediakan makanan dan minuman ringan. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan pokok, warga biasanya lebih sering menuju ke pusat kota untuk berbelanja. Selain berbelanja ke pusat kota, terdapat pula pedagang dari pusat kota yang menjajakan dagangannya ke Pulau Lakkang. Pedagang yang masuk ke Pulau Lakkang juga beraneka ragam, antara lain merupakan pedagang baju, sayur, makanan ringan dan sebagainya. Adapun sarana keamanan berupa pos keamanan lingkungan yang terletak di RW 1. Pos tersebut juga dijadikan sebagai sarana interaksi sosial antar warga. Tingkat keamanan di Pulau Lakkang cukup tinggi dibuktikan dengan rendahnya kasus kriminalitas.

Gambar 6. Sarana Pulau Lakkang (a) Sekolah; (b) Kantor Lurah; (c) Pustu (Analisis, 2020)



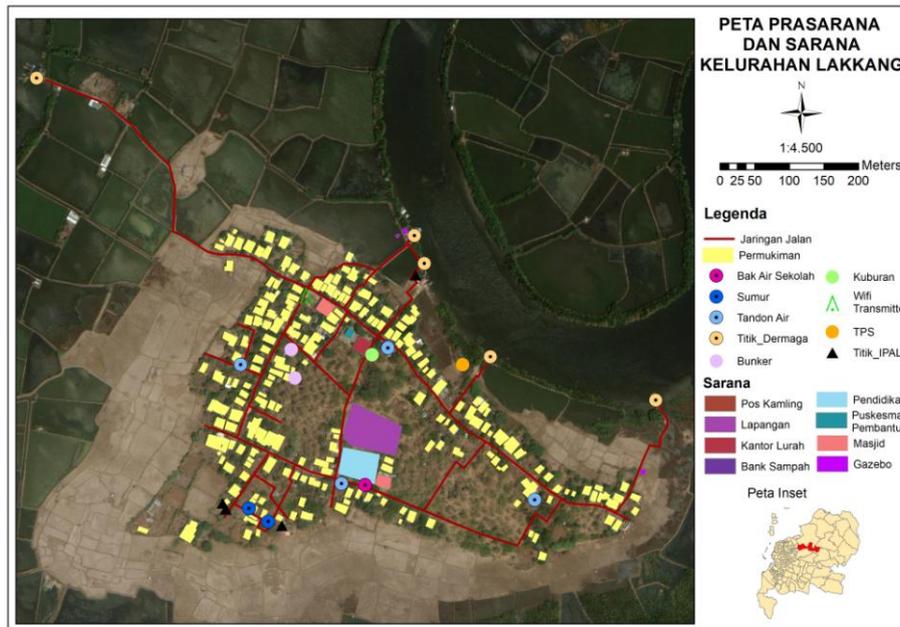
Kondisi Non Fisik Permukiman

Dari segi sosial budaya, warga di Pulau Lakkang sebagian besar merupakan warga asli pulau. Namun, tidak sedikit pula merupakan warga dari luar Pulau lakkang. Hubungan kekerabatan antar warga tergolong dekat yakni hubungan keluarga. Sikap gotong royong dan tingkat kepedulian yang tinggi antar warga juga masih sangat tinggi. Selain itu, sikap ramah warga Pulau Lakkang juga menjadi ciri khas tersendiri. Sikap ramah antar sesama warga juga kepada wisatawan yang datang juga menjadikan tempat tersebut nyaman untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.

Pekerjaan dominan warga Pulau Lakkang ialah petani sawah, petani tambak dan nelayan. Sebagian besar penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, petani tambak dan petani sawah hanya menggunakan hasil dari pekerjaannya sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi. Terdapat pula petani tambak ataupun nelayan yang menjual hasil tangkapannya. Penjualannya dilakukan dengan beberapa cara yakni mengumpulkan hasil tangkapannya kepada salah satu pengumpul yang ada di Pulau Lakkang atau membawa hasil tangkapan ke pusat Kota Makassar untuk dijual. Selain itu, ada pula pembeli yang datang ke pulau untuk melakukan transaksi dengan pemilik tambak. Beberapa ibu-ibu di Pulau Lakkang juga bekerja sebagai penjahit seragam sekolah. Kegiatan menjahit ini dilakukan selain sebagai penambah kegiatan, menjahit juga sebagai tambahan penghasilan bagi keluarga.

Pulau Lakkang memiliki beberapa kelompok masyarakat yang didasarkan atas profesi dan keahlian yang diminati. Kelompok tersebut antara lain : a)Kelompok Tani; b)Kelompok Tani Tambak; c)Kelompok Nelayan; d)Kelompok Pencinta *Mangrove*; e)Kelompok Kerajinan Bambu; dan e)Kelompok PKK. Kelompok-kelompok yang dibentuk tersebut telah mendapat beberapa bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diterima baik berupa alat bantu dan pelatihan. Kelompok tani mendapatkan bantuan berupa kontraktor sebagai alat bantu dalam bertani, kelompok kerajinan bambu mendapatkan pelatihan dari Dinas Pariwisata. Kelompok ibu-ibu PKK juga telah mendapatkan pelatihan kerajinan tangan menggunakan barang-barang bekas atau plastik. Bentuk bantuan berupa pelatihan juga didapatkan kelompok masyarakat lainnya dari pihak pemerintah kota

Gambar 7. Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan Lakkang (Analisis, 2020)



Permasalahan Aspek Fisik dan Non Fisik Pulau Lakkang

Setelah uraian kondisi fisik dan non fisik di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di Pulau Lakkang, yakni antara lain pada aspek lingkungan yaitu terdapatnya limbah industri yang mencemari sungai sehingga beberapa ikan mati mengapung, mengakibatkan para petani tambak dan nelayan cukup kesulitan. Limbah yang mengotori sungai berpengaruh pada kurangnya hasil tambak warga dikarenakan para petambak tidak membuka pintu air mereka karena takut air pada tambak ikut tercemar. Selain itu nelayan yang biasanya mencari ikan di sekitaran Sungai Tallo kini harus mencari pada area laut akibat pencemaran sungai tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian warga.

Pada aspek infrastruktur persampahan, permasalahan yang ada yakni pengolahan sampah yang masih sangat minim. Dimana sampah warga yang dikumpulkan hanya diletakkan pada suatu lokasi tanpa adanya pemilahan ataupun pengolahan. Tidak terdapat pula fasilitas yang menunjang untuk mengangkut sampah dari pulau menuju ke lokasi TPA Kota Makassar.

Pulau Lakkang yang direncanakan sebagai pulau wisata menjadikan banyaknya program bantuan bagi penduduk. Pelatihan tersebut baik dari segi pelatihan kerajinan maupun bantuan fisik berupa pemugaran situs sejarah berupa Bunker Jepang. Namun akibat tidak berkelanjutannya program dan tidak adanya bimbingan lanjutan kepada kelompok masyarakat yang ada menjadikan bantuan tersebut tidak efektif. Sementara jika melihat potensi yang ada, Pulau Lakkang memiliki potensi yang cukup dalam pengembangannya, tetapi mengalami kendala dari segi pemasaran dan pembimbingan keberlanjutan program. Hingga saat ini, kedatangan wisatawan ke Pulau Lakkang tidak mempengaruhi peningkatan ekonomi warga sekitar, selain penggunaan rumah warga sebagai *guesthouse* bagi wisatawan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan pengendalian atau aturan masuk ke dalam Pulau Lakkang atau wisata sejarah di Pulau Lakkang.

Konsep Penataan Permukiman Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Pulau Lakkang yang direncanakan sebagai pulau wisata menjadikan banyaknya program bantuan bagi penduduk. Pulau Lakkang memiliki potensi wisata menjadi potensi yang perlu diperhatikan. Tingkat perekonomian penduduk lokal yang mayoritas berpenghasilan rendah mampu ditingkatkan melalui pemanfaatan potensi wisata berbasis kearifan lokal. Hal ini selaras dengan pernyataan (Silaban & Nugroho, 2018) dimana pariwisata merupakan salah satu industri penggerak perekonomian suatu negara. Berkembangnya sektor wisata dapat memberikan manfaat ekonomi khususnya kepada masyarakat lokal yang tinggal di kawasan pariwisata.

Tabel 1. Potensi Wisata Pulau Lakkang ditinjau dari 4A (Analisis. 2020)

Komponen 4A	Kondisi sebagai dasar pertimbangan	
	Potensi	Permasalahan
1. Attraction		
a. Kegiatan berkemah dan wisata <i>outbound</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lapangan yang ada sudah digunakan secara rutin oleh beberapa pengunjung sebagai tempat berkemah dan kegiatan <i>outbond</i> 2) Banyaknya kegiatan lain yang dapat menunjang dipaketkan secara terpadu dengan kegiatan <i>outbond</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat sarana WC umum dan air bersih 2) Tidak ada batas yang jelas berupa tanaman pemisah antara area berkemah dan kuburan serta area lainnya
b. Ekowisata <i>mangrove</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya tanaman <i>mangrove</i> 30,18 Ha pada tahun 2018 (Arifin, 2019) dan terdapat pusat studi Universitas Hasanuddin di area Lakkang 2) Perahu penduduk dapat disewakan untuk menyusur pohon <i>mangrove</i> 3) Pengunjung/Wisatawan dapat ikut membibit dan menanam <i>mangrove</i> serta memberi label nama wisatawan yang menanam <i>mangrove</i> tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan <i>mangrove</i> masih belum terorganisir dan tertata 2) Tidak terdapat pihak pengelola 3) Perlu pembimbingan dan pembinaan kepada masyarakat terkait manajemen ekowisata <i>mangrove</i> yang efektif dan produktif 4) Diperlukan peningkatan fasilitas perahu milik masyarakat agar dapat dimanfaatkan sebagai alat wisatawan untuk menyusuri kawasan tanaman <i>mangrove</i>
c. Wisata edukasi alam seperti menanam <i>mangrove</i> , menanam padi dan menggarap tambak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia lahan pertanian berupa sawah tadah hujan serta lahan budidaya perikanan tambak, serta letak yang berdekatan dengan sungai Tallo, 2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengunjung antara lain menanam padi, tambak ikan Bolu, serta menangkap udang dan kepiting secara tradisional, 3) Pengunjung juga dapat melakukan kegiatan di sungai berupa menangkap ikan dengan tombak, 4) Terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang membidangi kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain kelompok <i>mangrove</i>, kelompok petani dan kelompok petani tambak 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada informasi terkait rutinitas penanaman padi serta pembersihan dan pengisian tambak 2) Kegiatan perikanan tambak kini hanya dilakukan oleh beberapa nelayan saja yang mendapatkan keahlian awal dari orang tua dan kemudian ditambah dengan pengalaman 3) Tombak ikan dilakukan pada malam hari 4) Pencemaran sungai akibat limbah pabrik berdampak pada kurangnya hasil tangkapan ikan serta pengolahan tambak warga 5) Belum ada pihak yang membina kelompok masyarakat yang ada terkait pengembangan wisata edukasi alam
d. Wisata kuliner	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat makanan tradisional khas, yakni 'Lawar Ikan' serta 'Pallu Unti-untia' 2) Terdapat kelompok ibu-ibu PKK beranggotakan ibu-ibu rumah tangga Pulau Lakkang yang telah mendapat pelatihan pembuatan menu kuliner 3) Beberapa rumah yang telah dikunjungi oleh wisatawan menyediakan makanan khas Lakkang untuk wisatawan tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan tradisional tersebut hanya dihidangkan pada saat-saat tertentu, misalnya saat ada jamuan atau wisatawan yang menginap 2) Belum ada fasilitas pemasaran hidangan tradisional khas penduduk setempat
e. Wisata sejarah dengan mengunjungi bunker jepang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat 3 situs bunker peninggalan Jepang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum ada pengelolaan wisata situs sejarah bunker 2) Salah satu bunker sulit diakses, karena terletak di belakang rumah warga
f. Wisata edukasi seni dengan membuat kerajinan tangan, belajar menari (tarian daerah versi penduduk lokal pulau lakkang) dan mencak (pencak silat).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat kelompok masyarakat yang telah menerima pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari bahan bekas serta kelompok pengrajin bambu 2) Penduduk setempat biasa menampilkan tarian tradisional khas Lakkang, serta pertunjukan mencak pada acara-acara tertentu 3) Terdapat tanaman bambu yang dapat dibuat kerajinan tangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut tidak berkelanjutan, perlu diberikan pembinaan dan pelatihan terkait pemasaran
2. Accesibility		
Perahu sebagai transportasi yang unik dan menyenangkan saat menyusuri Sungai Tallo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Satu-satunya akses menuju Pulau Lakkang yakni dengan melalui sungai Tallo menggunakan perahu 2) Berpotensi untuk dijadikan wisata sisir sungai yang terintegrasi dengan wisata Pulau Lakkang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah armada perahu yang ada terbatas serta jadwal yang tidak menentu 2) Fasilitas perahu yang ada perlu dilengkapi dengan pelampung dan desain dengan fasilitas yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan
3. Amenity		

Komponen 4A	Kondisi sebagai dasar pertimbangan	
	Potensi	Permasalahan
Terdapat fasilitas <i>Guesthouse</i> bagi wisatawan yang akan menginap..	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat 11 rumah warga yang telah pernah digunakan oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara untuk menginap dengan sistem penyewaan ruangan/kamar di dalam rumah. 2) Sikap warga yang ramah dan menyambut kedatangan wisatawan dengan baik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi sanitasi dan kebersihan rumah warga perlu diperhatikan agar dapat memberikan kenyamanan pada wisatawan
4. Ancillary		
Di Pulau Lakkang telah terdapat kelompok sadar wisata yang dapat mengawasi dan menyediakan fasilitas ketika wisatawan berkunjung.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata yang dapat diberikan pelatihan dan bimbingan guna peningkatan SDM dalam manajemen dan pengelolaan wisata yang efektif dan produktif 2) Masyarakat siap dan berkeinginan untuk dilibatkan dalam pengelolaan wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum ada bantuan baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun lembaga pemasyarakatan yang membantu dalam hal pemasaran dan promosi wisata.

Konsep penataan permukiman pariwisata menurut (Hasrullah & Suryawan, 2018), untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada, maka diperlukan arahan pengembangan berdasarkan konsep *community based tourism* yakni meningkatkan kesadaran, wawasan, pola pikir, dan motivasi masyarakat terkait pemanfaatan potensi pariwisata di Kampung Lakkang melalui tokoh masyarakat dalam setiap aktivitas sosial yang rutin terjadi seperti PKK, pertemuan warga rutin, dan pertemuan keagamaan.

Setelah mendapatkan data dan aspirasi dari masyarakat Pulau Lakkang, konsep penataan permukiman diarahkan pada penataan sarana dan prasarana permukiman yang dapat mendukung kegiatan pengembangan pariwisata serta penyediaan dan pemeliharaan sarana pariwisata.

- 1) Bimbingan dan pelatihan lebih lanjut kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada selaku SDM pariwisata Pulau Lakkang terkait pengelolaan dan pemasaran produk wisata. Pengelolaan wisata seharusnya bersifat mandiri, melibatkan tokoh desa dan masyarakat setempat serta berbasis pada asas manfaat bukan asas keuntungan, keterlibatan masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam pengelolaan wisata untuk pengambil bagian aktif dalam semua proses, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan, dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap perkembangan pariwisata setempat, sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat (Yuniarto, 2019).
- 2) Konsep pengembangan aksesibilitas yang diarahkan adalah sebagai berikut:
 - Penambahan jumlah angkutan perahu yang berfungsi membawa wisatawan menuju Pulau Lakkang serta untuk kegiatan wisata susur sungai dan mangrove.
 - Perbaikan akomodasi perahu dengan memperhatikan faktor keselamatan dan kenyamanan penumpang.
 - Penambahan halte Sungai Tallo sehingga dapat meningkatkan integrasi kendaraan umum pada Sungai Tallo
- 3) Penataan sistem pengelolaan persampahan menggunakan konsep sistem 3R yakni *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R tersebut bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah (H. Arifin, 2018).
- 4) Penataan prasarana limbah dilakukan dengan penyediaan sistem sanitasi dengan sistem biofilter dan penambahan WC umum yang layak pakai pada lokasi permukiman terutama pada sekitar lokasi wisata. Selain itu, diperlukan adanya tindakan tegas terhadap limbah pabrik yang mencemari Sungai Tallo. Sebab adanya pencemaran sungai ini berpengaruh terhadap pendapatan warga khususnya yang berprofesi sebagai nelayan.
- 5) Peningkatan konektivitas jaringan drainase yang melayani seluruh hunian penduduk sebagai upaya penataan sistem drainase. Hal tersebut dilakukan agar pembuangan limbah *grey water* penduduk dapat terorganisir dengan baik.
- 6) Penataan prasarana air bersih dilakukan dengan pengadaan sumber air bersih berupa PDAM yang dapat melayani seluruh hunian penduduk.
- 7) Tata bangunan di wilayah Kelurahan Lakkang belum memiliki tata letak yang baik khususnya terkait tata letak bangunan yang sejajar satu sama lainnya. Jalan rumah Tata lingkungan pada wilayah Kelurahan Lakkang, didukung dengan adanya tempat sampah di jalan, serta adanya lampu jalan yang lokasinya dominan berada pada wilayah RW 1. Kondisi tempat sampah yang ada perlu ada perbaikan dan

5. REFERENSI

- Anisa, A., Septiawan, T., Rahmah, G. L. N., Kadeli, Putro, S. A., & Kurnia, T. (2018). Eksplorasi Kondisi Fisik Dan Non Fisik Perikanan Tradisional Di Kampung. *Langkau Betang*, 5(1), 55–67.
- Arifin, H. (2018). PENGELOLAAN SAMPAH PASAR KURAITAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN. *Menara Ilmu*, XII(8), 61–68.
- Arifin, M., Rasyid, A. R., Jamaluddin, J., Setyo, D. P., & Armansyah, A. (2019). The existence of a mangrove ecosystem as nature tourism-based on global warming mitigation in Lakkang island. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012014>
- BPS. (2020). *Kecamatan Tallo dalam Angka 2020*.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Wanhill, S., & Fyal, A. (1993). *Tourism: Principles and Practice* (3rd ed.). Pitman Publishing Limited.
- Hasrullah, & Suryawan, I. B. (2018). Penerapan Community Based Tourism Di Kampung Lakkang Sebagai Daya Tarik Wisata. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p20>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pub. L. No. Nomor 10 Tahun 2009 (2009). <https://doi.org/10.15957/j.cnki.jjdl.2009.07.004>
- Manteiro, M. C. B. (2016). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(2), 93–101. <http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/bisman/article/download/56/29>
- Rahmadaniyati, D., Widyasari, A., Kisnarini, R., & Sumartinah, H. R. (2017). The Inner-City Kampung Development Concept as Sustainable Tourism Area in Surabaya , Indonesia. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 6(01), 114–119. <http://www.ijert.org>
- Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 37–47. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2009.003.01.5>
- Silaban, U. M. M., & Nugroho, S. (2018). Kontribusi Desa Wisata Sendang Duwur Kabupaten Lamongan Terhadap Ekonomi Ta mbahan (Ancillary Service). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(2), 245–251.
- Standar Nasional Indonesia. (2004). SNI Lingkungan Perumahan di Perkotaan. In *Badan Standardisasi Nasional. Jakarta*.
- Sufia, R., Sumarmi, & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(4), 726–731. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6234>
- Widodo, B., & Lupyanto, R. (2011). Pengembangan Kawasan Pinggiran Kota dan Permasalahan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 3(1), 31–51.
- Yuniarto, S. (2019). Pengembangan Kawasan Wisata Sumber Taman di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. *Karta Raharja*, 1(1), 1–10. <http://ejournal.malangkab.go.id/index.php/kr>